

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar belakang

United Nations setiap tahunnya mengirimkan ribuan pasukan penjaga perdamaian (*peacekeeping*) ke negara-negara yang mengalami konflik dengan tujuan untuk menolong negara tersebut. Tugas dari pasukan perdamaian adalah memantau dan mengawasi proses perdamaian di wilayah konflik.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaan Operasi Perdamaian, PBB memiliki prinsip dasar yaitu tidak berpihak kepada siapapun dan tidak menyalahgunakan wewenang serta wajib menjalankan tugas yang dimandatkan.<sup>2</sup> Salah satunya negara konflik yang menjadi dikirimkan UN Peacekeeping adalah Haiti.

Konflik di Haiti awalnya terjadi pada masa pemerintahan Jean-Claude Duvalier yang memerintah Haiti selama hampir 30 tahun, dimana pemerintahan Duvaliers ini diwarnai oleh aksi kekerasan, sehingga pemerintahan Duvaliers dianggap pemerintahan dengan budaya kekerasan di Haiti.<sup>3</sup> Tindakan kekerasan yang dilakukan pada masa pemerintahan Duvaliers, memicu masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah. Kemudian Pemerintahan Duvaliers merespon tindakan pemberontakan ini dengan cara berupa kekerasan dan penyiksaan kepada orang-orang yang dianggap musuh pemerintah karena melawan rezim yang berkuasa. Dari peristiwa ini, ribuan orang

---

<sup>1</sup> Hardi Alunaza SD & Bastian Andhony Toy “Efektivitas Peacekeeping oleh United Nations-African Union Hybrid Operation Mission In Darfur (UNAMID) pada Konflik Di Sudan Tahun 2007-2010”, Padang : Andalas Journal of International Studies| Vol VII No 1 May 2018

<sup>2</sup> UN Peacekeeping, *What Peacekeeping Does*, <https://peacekeeping.un.org/en> di akses pada (tanggal 19 agustus 2018)

<sup>3</sup> The Tontons Macoutes, literally the bogeymen in Créole, were created by François Duvalier in 1959, following an attempted coup. In 1971, his son officially re-named the para-military group as Milice Volontaire de la Sécurité Nationale.

terbunuh dan yang lainnya melarikan diri.<sup>4</sup> Kekerasan terus terjadi di Haiti hingga akhirnya Duvalier lengser.

Pasca lengsernya Jean-Claude Duvalier pada Februari 1986, politik di Haiti mengalami transisi. Kemudian Jean Bertrand Aristide dipilih menggantikan Duvalier dan mulai berkuasa pada bulan Desember 1990. Namun terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Cedras yang menyebabkan lengsernya Aristide dan kemudian pada tahun 2004 diasingkan ke Amerika Serikat.<sup>5</sup> Kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Cedras ini adalah salah satu peristiwa berdarah terbesar dalam sejarah Haiti, karena memakan korban sebanyak 1.500 orang meninggal, 40.000 orang melarikan diri dari Haiti dan 200.000 - 300.000 orang meninggalkan ibukota dan pindah kepedesaan. Konflik ini terjadi karena adanya pertentangan antara pihak pro pemerintah dengan yang tidak.<sup>6</sup> Peristiwa berdarah di Haiti ini menjadi sorotan masyarakat internasional, karena dianggap sebagai tindakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM sehingga menimbulkan banyaknya kencana.

Terkait konflik yang terjadi di Haiti akhirnya PBB mengutus pasukan perdamaian untuk menciptakan perdamaian di Haiti. Adapun misi tersebut dikenal dengan *United Nations Stabilization Mission In Haiti (MINUSTAH)*. *MINUSTAH* didirikan pada tanggal 1 Juni 2004 oleh *Security Council Resolution 1542*.<sup>7</sup> *MINUSTAH* pada awalnya dibentuk untuk mendukung Pemerintahan

Transisi dalam memastikan lingkungan yang aman dan stabil, serta memantau,

---

<sup>4</sup> Carol Faubert, "Evolution of UNDP assistance to conflict affected countries Case Study Haiti", New York 2006 hal 9

<sup>5</sup> Nicolas Lemay-Hebert, "United Nations Stabilisation Mission In Haiti (MINUSTAH)", University Of Birmingham, 2015, hal 722

<sup>6</sup> Council on Hemispheric affairs <http://www.coha.org/tonton-macoutes/> di akses pada tanggal 25 agustus 2018

<sup>7</sup> UN Peacekeeping "Minustah Fact Sheet United Nations Stabilization Mission In Haiti" <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minustah> (di akses pada tanggal 19 Agustus 2018)

merestrukturisasi dan mereformasi Polisi Nasional Haiti.<sup>8</sup> Misi tersebut juga dikirim untuk membantu program-program Pelucutan, Demobilisasi dan Reintegrasi (DDR)<sup>9</sup> yang komprehensif dan berkelanjutan demi membantu pemulihan dan pemeliharaan aturan hukum, keamanan publik, serta ketertiban umum di Haiti. Misi ini melindungi pasukan perdamaian serta fasilitas, instalasi dan peralatan, untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik yang akan terjadi.<sup>10</sup>

Terkait misi di Haiti ini *MINUSTAH* menempatkan 6.700 personel militer, 1.622 polisi, sekitar 550 personel sipil internasional, 150 sukarelawan PBB dan sekitar 1.000 staf sipil. Operasi *MINUSTAH* menempatkan personil yang disesuaikan oleh Dewan Keamanan untuk beradaptasi dengan keadaan di lapangan dengan persyaratan yang ada sebagaimana ditentukan oleh situasi politik, keamanan dan sosial ekonomi yang berlaku di negara Haiti.<sup>11</sup> Dalam pelaksanaan misi ini, pasukan perdamaian diharapkan bekerja secara optimal dalam menciptakan perdamaian dan kestabilan politik dan keamanan di Haiti.<sup>12</sup> Namun, ditengah prosesnya pasukan perdamaian malah menyebabkan persoalan baru yaitu mereka melakukan pelecehan seksual pada anak laki-laki dan perempuan. Seperti yang dikutip dalam *Global News*, setidaknya 134 pasukan perdamaian berkewarganegaraan Sri Lanka mengeksploitasi sembilan anak dari tahun 2004 hingga tahun 2007. Usaha yang dilakukan dalam memikat anak-anak

---

<sup>8</sup> UN Peacekeeping, <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minustah>. Di akses pada tanggal 23 september 2018

<sup>9</sup> Program DDR merupakan bagian penting untuk dapat mengurangi resiko meningkatnya kembali kekerasan bersenjata serta menciptakan situasi negara yang aman dan stabil pascakonflik.

<sup>10</sup> Canisius Collage Model United Nations 38<sup>th</sup> Annual Conference, "*Situation In Haiti, and the UN Mission (MINUSTAH)*"

<sup>11</sup> Canisius Collage Model United Nations 38<sup>th</sup> Annual Conference hal 2

<sup>12</sup> Hardi Alunaza SD & Bastian Anndhony Toy | Efektivitas Peacekeeping oleh United Nations-African Union Hybrid Operation Mission In Darfur (UNAMID) pada Konflik Di Sudan Tahun 2007-2010

tersebut agar bersedia melakukan hubungan seks, para personel tersebut menawari mereka dengan kue atau beberapa lembar uang Dollar. Hal ini serupa dengan investigasi oleh *Associated Press*, Organisasi berita yang bermarkas di New York, terkait misi PBB di Haiti, mereka menemukan bahwa terdapat 150 orang korban pelecehan dan eksploitasi seksual oleh pasukan pemelihara perdamaian PBB dilaporkan di Haiti antara 2004 dan 2016. Korban pelecehan seksual terdiri dari perempuan dan laki-laki dengan rentang usia 12-15 tahun dan telah menjadi korban dari lebih 100 personel pasukan perdamaian yang berasal dari berbagai macam kewarganegaraan.<sup>13</sup>

Dari data survei yang dihimpun oleh Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat Amerika Serikat, terdapat 2916 orang yang diwawancarai. Dari jumlah tersebut ditemukan terdapat dua kelompok rentang usia 13-24 dengan jumlah 1.457 wanita 1459 laki-laki. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa korban pelecehan seksual yang terbanyak justru berasal dari jenis kelamin laki-laki. Adapun rinciannya yakni korban pelecehan seksual rentang usia 13-17 tahun setidaknya satu insiden pelecehan seksual dialami oleh 4% perempuan dan 7% laki-laki. Selanjutnya pada rentang usia 13-24 tahun, persentase laki-laki juga masih lebih banyak dari perempuan, yaitu 84,4% dan 69,5%.<sup>14</sup> Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, melainkan juga laki-laki.

Seperti dua sisi mata uang, meskipun misi ini mendapat pujian dari PBB karena pasukan perdamaian berhasil melakukan transisi politik yang stabil setelah

---

<sup>13</sup>Global news “UN peacekeepers in Haiti ran child sex rings, raped women: AP investigation” <https://globalnews.ca/news/3380202/un-peacekeepers-child-sex-haiti/> (di akses pada tanggal 20 agustus 2018)

<sup>14</sup>Centers For Disease Control And Prevention U.S Department Of Health And Human Services “Violence Against Children In Haiti Findings From A National Survey 2012”

konflik di Haiti, tetapi di lain pihak, masalah baru muncul karena pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pasukan perdamaian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah apa yang akan dilakukan oleh PBB dalam menyelesaikan masalah pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian terhadap anak.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Permasalahan konflik di Haiti terjadi pada masa pemerintahan Duvaliers yang memerintah Haiti selama hampir 30 tahun. Pemerintahan Duvaliers ini diwarnai oleh aksi kekerasan. Fakta ini membuat PBB mengambil tindakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan kejahatan kemanusiaan di Haiti, dengan mengirimkan pasukan perdamaian dalam misi yang dikenal dengan *United Nations Stabilization Mission In Haiti (MINUSTAH)*. *MINUSTAH* pada awalnya dibentuk untuk mendukung pemerintahan transisi dalam memastikan lingkungan yang aman dan stabil. Namun, pasukan perdamaian dalam misi ini ternyata melakukan tindakan pelecehan seksual tidak hanya pada anak perempuan tetapi juga anak laki-laki, yang tentunya melanggar prinsip dari pasukan perdamaian itu sendiri. Oleh sebab itu menarik untuk melihat langkah PBB dalam mengatasi tindakan pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian pasca konflik Haiti.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas maka penulis memunculkan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana upaya PBB dalam mengatasi pelecehan seksual oleh Pasukan perdamaian pasca konflik Haiti ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya yang diambil PBB dalam menyelesaikan permasalahan pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian yang terlibat dalam MINUSTAH di Haiti.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dijadikan sebuah pembelajaran yaitu:

- 1) Penelitian ini berguna sebagai landasan bagi para peneliti dan akademisi untuk menganalisa dan mengkaji studi mengenai kerjasama sebuah *Intergovernmental Organization* suatu negara.
- 2) Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi pelecehan seksual terhadap anak di Haiti.

#### **1.6. Tinjauan Pustaka**

Pada penelitian ini, peneliti akan menampilkan beberapa tulisan yang mengkaji permasalahan yang sekiranya membantu peneliti dalam memahami masalah yang diangkat. Pertama, peneliti menggunakan penelitian dari Rút Madáčová berjudul "*Haiti, roots of the conflict and future development*".<sup>15</sup> Pada tulisan ini menjelaskan Haiti adalah republik kulit hitam bebas pertama di dunia yang lahir dari perang kemerdekaan pada 1804. Terlepas dari itu, pembangunan di Haiti tidak berkembang dan berada dalam krisis. Untuk menyelesaikan krisis, PBB memberikan bantuan dengan mengirim misi kemanusiaan yang bertujuan

---

<sup>15</sup> Rút Madáčová "*Haiti, roots of the conflict and future development*", International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science Volume 01 - Issue 08, June 2018.

untuk menciptakan keamanan dan kestabilan. Namun, menurut Madáčová misi ini menimbulkan malapetaka, karena menyebabkan penyakit kolera yang menewaskan 10.000 orang. Oleh sebab itu menurut Madáčová, Haiti mungkin akan lebih baik tanpa misi penjaga perdamaian PBB. Tulisan Rút Madáčová ini memberi gambaran pada peneliti bahwa misi PBB menimbulkan efek samping yang menewaskan banyak orang karena timbulnya penyakit kolera.

Kedua, peneliti menggunakan penelitian Ketty Luzincourt dan Jennifer Gulbrandson yang berjudul “*Education and Conflict in Haiti Rebuilding the Education Sector after the 2010 Earthquake*”.<sup>16</sup> Tulisan ini menjelaskan gempa bumi besar-besaran pada Januari 2010 menghancurkan hampir setiap aspek masyarakat Haiti. Bahkan menurut Luzincourt dan Gulbrandson, sebelum gempa bumi, Haiti menghadapi krisis di sektor pendidikannya, hal ini disebabkan oleh konflik internal pada tahun 1986. Untuk menghadapi banyak tantangan mendesak di Haiti, menurut Luzincourt dan Gulbrandson perlu dikembangkan pendekatan baru untuk pendidikan berdasarkan kesetaraan, inklusi, dan keragaman. Pendekatan yang tidak hanya akan meningkatkan sektor pendidikan tetapi juga mengarah pada peningkatan keamanan. Dari tulisan Ketty Luzincourt and Jennifer Gulbrandson digunakan peneliti untuk melihat situasi konflik yang terjadi di Haiti pasca lengsernya Jean-Claude Duvalier.

Ketiga peneliti menggunakan penelitian Leonard F. Hutabarat yang berjudul “Peningkatan Female Peacekeepers Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian UN”.<sup>17</sup> Misi pemeliharaan perdamaian mengalami evolusi yang

---

<sup>16</sup> Ketty Luzincourt and Jennifer Gulbrandson “*Education and Conflict in Haiti Rebuilding the Education Sector after the 2010 Earthquake*”, United States Institute of Peace. August 2010

<sup>17</sup> Leonard F. Hutabarat “Peningkatan Female Peacekeepers Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian UN” *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* vol 7, 2017

meliputi pendekatan kemanusiaan yang lebih luas, personel wanita semakin meningkat menjadi bagian dari misi pemeliharaan perdamaian. PBB telah meminta lebih banyak penggelaran *female peacekeepers* guna memperkuat pendekatan. *Female peacekeepers* yang terlatih menjadi aset bagi masa depan operasi-operasi pemeliharaan perdamaian. Pada bulan Oktober 2000 Dewan Keamanan PBB telah menetapkan Resolusi 1325 mengenai Perdamaian dan Keamanan Wanita. Dewan Keamanan mengakui kontribusi wanita selama konflik dan pasca konflik. Tahun 2014 dari hampir 125.000 pasukan perdamaian PBB, wanita mencakup 3% dari personel militer yang ada dan 10% dari personel polisi dalam misi menjaga perdamaian PBB. Dari tulisan Leonard F. Hutabarat ini melihat peran pasukan perdamaian perempuan yang melakukan misi di PBB.

Keempat peneliti menggunakan penelitian dari Anna Maria Wiker yang berjudul "*Sexual Exploitation And Abuse In U.N Peacekeeping*".<sup>18</sup> Misi menjaga perdamaian PBB telah dikaitkan dengan eksploitasi dan pelecehan seksual (*SEA, Sexual Exploitation And Abuse*). Kasus pertama yang didokumentasikan dari SEA di Timor-Leste ditelusuri kembali ke tahun 1990-an untuk misi penjaga perdamaian PBB di Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Kamboja, dan Timor Leste. Sejak saat itu, kasus dugaan pelecehan telah cukup sering terjadi di berbagai misi dan negara di seluruh dunia. Eksploitasi dan pelecehan masih dilaporkan dari berbagai basis misi, di samping sejumlah kejahatan yang tidak diketahui yang tidak dilaporkan. Penelitian ini memberikan gambaran kepada peneliti bahwa misi menjaga perdamaian erat kaitannya dengan tindakan pelecehan seksual yang sering dilakukan dan tidak dilaporkan.

---

<sup>18</sup> Anna Maria Walker, "*Sexual Exploitation And Abuse In U.N Peacekeeping*", *Cei International Affairs*, June 2005

Kelima, peneliti menggunakan penelitian dari Rozalia yang berjudul “Peran *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Di Republik Afrika Tengah Tahun 2013-2016”.<sup>19</sup> Studi ini menggambarkan Peran Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual di Republik Afrika Tengah pada 2013-2016, karena pelaku yang terlibat didalamnya merupakan bagian dari PBB. Dibentuknya unit koordinasi khusus dengan pengawasan dan kemampuan pemantauan, didukung oleh kelompok kerja dengan keahlian bidang HAM dan kekerasan seksual. Fungsi dari unit akan mencakup pemantauan, pelaporan, menproses tuduhan pelecehan seksual, menganalisis data dengan maksud untuk tren pelacakan dan praktek untuk tujuan meningkatkan pencegahan, akuntabilitas dan memastikan pelaksanaan rekomendasi Panel.

Kelima tulisan diatas memberikan bantuan kepada peneliti dalam memberikan gambaran terkait situasi konflik Haiti, serta tindakan pelecehan seksual yang sering dilakukan oleh pasukan perdamaian dalam misi PBB. Namun, kelima tulisan tersebut belum menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Oleh sebab itu penelitian ini akan menganalisis Upaya apa yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan permasalahan pelecehan seksual tersebut.

## **1.7. Kerangka Konseptual**

### **1.7.1. Security Sector Reform**

*Security Sector Reform* adalah pendekatan sistem yang menekankan sifat yang saling berhubungan dari lembaga sektor keamanan dan memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk memastikan pengawasan demokratis dan sipil terhadap

---

<sup>19</sup> Rozalia “*Peran United Human Right Council (UNHRC) Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di Republik Afrika Tengah Tahun 2013-2016*” Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Oktober 2017

sektor keamanan, misalnya dengan memperkuat manajemen dan kapasitas pengawasan kementerian pemerintah, parlemen dan organisasi masyarakat sipil. Kedua, untuk mengembangkan sektor keamanan yang efektif, terjangkau dan efisien, misalnya dengan merestrukturisasi atau membangun kapasitas manusia dan material.<sup>20</sup> SSR mereformasi sektor atau sistem keamanan yang mencakup semua aktor, peran, tanggung jawab, dan tindakan mereka bekerja bersama-sama untuk mengelola dan mengoperasikan sistem dengan cara yang lebih konsisten dengan norma-norma demokratis dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, dan dengan demikian dapat berkontribusi pada kerangka kerja keamanan yang berfungsi dengan baik.<sup>21</sup>

Reformasi sektor keamanan dirancang untuk mengatasi berbagai masalah dalam sektor keamanan seperti korupsi, kurangnya kapasitas teknis, pelanggaran hak asasi manusia, kurangnya transparansi dan pengawasan, serta masalah sosial yang lebih luas seperti kejahatan dan kekerasan bersenjata. Dalam hal operasional, SSR mencakup berbagai kegiatan, yang dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu:<sup>22</sup>

1. Memperkuat kontrol sipil dan pengawasan sektor keamanan

Dalam hal ini, reformasi institusi lembaga sipil pemerintah dan non-pemerintah yang relevan dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk pengawasan, pengelolaan, dan pengendalian sektor keamanan dengan membuat lembaga institusi keamanan yang memastikan fungsi sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Hänggi, H., "Making Sense of Security Sector Governance", *Challenges of Security Sector Governance*, eds. Hänggi, H. and Winkler, T.H. (DCAF: Geneva) 2003, pp.17-18.

<sup>21</sup> OECD DAC, "Security System Reform and Governance, DAC Guidelines and Reference Series" (OECD: Paris), p. 20. <http://www.oecd.org/dataoecd/8/39/31785288.pdf> (di akses pada tanggal 28 Agustus 2018)

<sup>22</sup> Towards a Better Practice Framework in Security Sector Reform: Broadening the Debate." Occasional SSR Paper No. 1. The Hague and London: Netherlands Institute of International Relations "Clingendael," International Alert, and Saferworld, 2002.

peran mereka dalam masyarakat demokratis. Seperti mengembangkan kapasitas LSM, Lembaga penelitian dan advokasi agar mendukung upaya membangun kepercayaan di dalam militer bahwa institusi sipil mampu dengan sukses dan efisien mengevaluasi persyaratan keamanan atau mengambil tanggung jawab untuk keputusan yang terkait dengan keamanan.

#### 2. Profesionalisasi pasukan keamanan

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan bersenjata melalui program yang dirancang untuk militer dalam melatih tentara untuk memahami peran dan perilaku pasukan keamanan yang tepat. Hal ini misalnya dilakukan dengan cara pelatihan tentang akuntabilitas demokrasi, HAM, Hukum Humaniter Internasional, dan Isu Gender, serta juga memperkuat kapasitas polisi dalam memastikan mereka menjamin keamanan publik dan ketertiban hukum.

#### 3. Demiliterisasi dan pembangunan perdamaian

Hal ini dilakukan untuk membantu mengurangi ketersediaan dan penyalahgunaan senjata api kecil dan melatih kembali para militer untuk dimasa yang akan datang. Program ini untuk mengurangi ketersediaan dan penyalahgunaan senjata api serta perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi. Perlucutan senjata ini mengurangi ketersediaan senjata api dalam masyarakat pasca konflik. Demobilisasi yaitu pembubaran kelompok bersenjata dan proses rekonsiliasi pembangunan perdamaian. Reintegrasi yaitu penyisipan kembali kombatan bersenjata kedalam kegiatan sipil.

#### 4. Memperkuat aturan hukum

Hal ini membangun kerangka hukum yang kuat dan independen yang memberikan kendali demokratis-sipil terhadap pasukan keamanan dengan menetapkan sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk mereformasi hukum dan pengembangan kapasitas untuk peradilan dan parlemen, serta membentuk pengadilan yang independen, bebas dari pengaruh politik.

Dari keempat komponen diatas dapat dikelompokan otoritas dan instrumen untuk menggunakan kekuatan (misalnya militer, polisi, paramiliter, badan intelijen). Lembaga yang memantau dan mengelola sektor (misalnya pemerintah, parlemen, masyarakat sipil dan struktur yang bertanggung jawab untuk mempertahankan supremasi hukum (misalnya peradilan, kementerian kehakiman, penjara, komisi hak asasi manusia, mekanisme peradilan lokal dan tradisional).<sup>23</sup>

Di negara-negara yang terpengaruh oleh konflik bersenjata, sektor keamanan juga mencakup aktor-aktor non-negara seperti gerakan oposisi bersenjata, milisi dan perusahaan keamanan swasta. Selain itu media, akademisi dan masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam memantau kegiatan dan meminta pertanggung jawaban. Reformasi sektor ini penting untuk mempromosikan perdamaian dan pemerintahan yang baik dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, SSR diperlukan untuk memastikan bahwa, kekuatan tidak berkumpul kembali untuk mengguncang atau menimbulkan ancaman bagi perdamaian, suap dan korupsi dihilangkan, dan sektor (termasuk struktur kepemimpinan) sepenuhnya diubah sehingga memperoleh kredibilitas, legitimasi dan kepercayaan di mata publik. Jika sektor keamanan tidak ditangani

---

<sup>23</sup> Towards a Better Practice Framework in Security Sector Reform: Broadening the Debat hal 5

secara memadai dan pada waktunya, ada kemungkinan bahwa dana akan terus salah arah, sehingga menghambat proses rekonstruksi pasca-konflik.

Dalam jangka panjang, SSR biasanya dipahami memiliki dimensi politik, terutama berdasarkan prinsip kontrol sipil atas badan-badan militer dan keamanan, kelembagaan, mengacu pada transformasi fisik dan teknis dari entitas keamanan misalnya struktur pembentukan keamanan, jumlah pasukan, peralatan, dan ekonomi. Berkaitan dengan pembiayaan dan anggaran pasukan, serta masyarakat, terkait dengan peran masyarakat sipil dalam memonitor kebijakan dan program keamanan.

Seperti yang ditunjukkan oleh banyak kegiatan yang tercantum di atas, SSR adalah proses yang kompleks dan panjang yang melibatkan sebagian besar kementerian dan lembaga pemerintah serta semua sektor masyarakat sipil. Hambatan untuk penerapannya banyak, tetapi hasil akhir yang ideal adalah struktur keamanan yang demokratis dan dipimpin oleh sipil yang terjangkau dan melayani dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu melakukan reformasi di sektor keamanan yang responsif gender, oleh sebab itu terdiri dari empat tahapan yang sudah di jabarkan di atas.

### **1.8. Metodologi**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada proses daripada hasil sehingga penulis tertarik kepada proses, tujuan, maksud, dan memahami gejala melalui kata-kata atau gambar.<sup>24</sup> Metode ini digunakan untuk menggali dan memahami makna

---

<sup>24</sup>John W.Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach*, .United Kingdom: Sage publications, hal. 173

yang bersumber dari perorangan atau kelompok mengenai masalah sosial atau masalah manusia.<sup>25</sup> Jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran sistematis, aktual dan akurat terhadap suatu situasi, peristiwa maupun fenomena tertentu.

### 1.8.1 Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian ini dilihat dari tahun 2004 awal dibentuknya dan 2016 misi ini selesai dengan nama Misi *MINUSTAH* di Haiti yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian.

### 1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dipahami sebagai tahapan yang dilakukan yaitu melakukan pencarian, penelusuran dan pengumpulan dari sumber-sumber yang relevan dan berhubungan dengan penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen tentang pasukan perdamaian oleh UN Peacekeeping dan PBB dilihat dari dokumen resmi PBB dan UN Peacekeeping Operation, artikel berita dan report yang berhubungan dengan pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian dari UN DDR, *Cansius Collage Model Unite Nations* dan *Centers for disease Control and Prevention U.S depertement and Human Services*. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data tentang jumlah pasukan perdamaian melakukan pelecehan seksual dari *Associated Press investigation*, berita dari BCC, Wordaltas, SINDO, Haiti Libre, *Global News* Maupun dari portal pemerintahan Haiti serta website resmi dari UN dan Peacekeeping Operation.

---

<sup>25</sup>John W.Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed MethodsApproaches*, Chapter 1, dapat diakses melalui [http://www.sagepub.com/upm-data/22780\\_chapter\\_1.pdf](http://www.sagepub.com/upm-data/22780_chapter_1.pdf)

<sup>26</sup> Lawrence W. Neuman, *Sosial research Methods: Qualitative and Quantitative Approach 3rd Edison* (Boston: Allyn and Bacon1997) p70

### 1.8.3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan penelusuran data-data yang dilakukan secara mendalam. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data yang mendasar dalam penarikan kesimpulan.<sup>27</sup>

Teknik analisis dalam penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian di negara Haiti. Penelitian menggunakan konsep SSR (*Security Sector Reform*), untuk membantu peneliti dalam menganalisis upaya PBB dalam menyelesaikan pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian. Konsep ini digunakan dari hasil temuan PBB yang menjelaskan tahapan-tahapan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan PBB oleh pasukan perdamaian.

Konsep ini digunakan untuk mereformasi sektor keamanan dalam struktur pasukan perdamaian yang akan diterapkan dengan empat tahapan yaitu memperkuat kontrol sipil dengan menggunakan pasukan keamanan dan polisi nasional Haiti bekerja sama dalam penindakan pelecehan seksual, demobilisasi dan pembangunan perdamaian dengan merubah sistem militer MINUSTAH serta negara Haiti melauan tindakan pengembangan pelatihan mengenai pelecehan seksual, memperkuat aturan Hukum dengan merubah Hukum di Haiti dengan mereformasi Hukum yang ada dalam kasus pidana dan MINUSTAH merubah sistem hukum yang ada dengan menambahkan hukuman oleh pasukan perdamaian, dan profesionalisasi pasukan perdamaian dengan pelatihan sebelum

---

<sup>27</sup> Catherine Marshal dan Gretchen B rossman, *Designing Qualitative Research 3e* (California: Sage Publications Inc, 1999) p 150

melakukan misi perdamaian. Dari empat Tahapan *Security Sector Reform* ini akan menganalisis upaya PBB dalam menyelesaikan masalah pelecehan seksual di Haiti.

#### **1.8.4 Unit Analisis, Unit Eksplanasi, dan Tingkat Analisis**

Unit analisis yaitu perilaku objek yang menjadi landasan keberlakuan pengetahuan yang digunakan sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang menjadi penjelas dari unit analisis.<sup>28</sup> Maka berdasarkan uraian di atas unit analisis dalam penelitian ini adalah PBB. Unit ekplanasi dalam penelitian ini pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian. Adapun level analisis pada penelitian ini adalah Sistem Internasional.

#### **1.9 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan penelitian sehingga kelak dapat menjadi bahan bacaan yang baik dan sinkron, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan Bab pengantar yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanyaan penelitian, teori dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, teori dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

---

<sup>28</sup> Joshua S. Golstein, John C. Pavehouse, "*Level of Analysis*" (London: Pearson International Edition, International Relations, Eighth Edition, 2007) halaman 17.

## **BAB II KONFLIK HAITI**

Bab ini peneliti membahas mengenai Konflik di Haiti dari sejarah terjadinya konflik dan dampak dari konflik itu sendiri. Bab ini juga melihat bagaimana pemerintahan yang terjadi pada saat konflik di Haiti.

## **BAB III MASALAH PELECEHAN SEKSUAL OLEH UNITED NATION STABILISATION MISSION IN HAITI**

Pada bab ini peneliti membahas mengenai MINUSTAH mulai datang ke Haiti dan pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian PBB di Haiti saat datangnya MINUSTAH di Haiti.

## **BAB IV UPAYA PBB DALAM MENYELESAIKAN PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN PASUKAN PERDAMAIAN DI HAITI MELALUI SECURITY SECTOR REFORM**

Pada bab ini berisi analisis dari peranan UN dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian menggunakan Konsep *Security Sector Reform*. Dalam bab ini juga dijelaskan peran PBB dan hambatan yang dialami dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian di Haiti.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisi hasil dari penelitian dan kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini.